



The Evaluation of Community Empowerment through Society Forest Schemes

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Skema Hutan Kemasyarakatan

Rendra Setyadiharja^a, Raja Dachroni^b, Suherry^{c*}

^{a,b,c}Program Studi Ilmu Pemerintahan Stisipol Raja Haji, Jalan Raja Haji Fisabilillah No.48, Kota Tanjungpinang 29100, Indonesia

*Correspondence e-mail: suherry89@gmail.com

Information Article

History Article

Submission : 10 October
2019

Accepted : 10 December
2019

Published : 30 December
2019

DOI Article:

[10.24905/jip.4.2.2019.90-103](https://doi.org/10.24905/jip.4.2.2019.90-103)

A B S T R A C T

The Community Empowerment Program in the Busung and Kuala Sempang Villages of the Bintan Regency is carried out through a community forestry scheme, with a Mangrove Ecotourism program, a Mangrove Nursery, and Planting Program, a Fish, Shrimp, and Mangrove Crab Program, and a Mangrove Product Management Program. But there are still symptoms of problems in the administration of the program. This study aims to evaluate community empowerment programs in coastal villages through the community forestry scheme in Bintan Regency. Using Dale's concept of Program Evaluation, this research resulted in a holistic and evaluative explanation of the village community empowerment program through the community forestry scheme established in Bintan Regency. The results of this research are formative evaluative recommendations for the government and other stakeholders both at the regional and national scale in terms of formulating policies related to village community empowerment programs that use forest natural resources in the future.

Key Word: Community Empowerment; Community Forestry; Formative Evaluation.

Program Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Busung dan Desa Kuala Sempang Kabupaten Bintan dilakukan melalui skema hutan kemasyarakatan, dengan program Ekowisata Mangrove, Program Pembibitan dan Penanaman Mangrove, Program Budidaya Ikan, Udang dan Kepiting Bakau, dan Program Pengelolaan Hasil Mangrove. Namun masih terdapat gejala masalah dalam penyelenggaraan program tersebut. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat di desa pesisir melalui skema HKm di Kabupaten Bintan. Dengan menggunakan konsep Dale tentang Evaluasi Program, penelitian ini menghasilkan suatu eksplanasi yang holistik dan evaluatif terkait program pemberdayaan masyarakat desa melalui skema HKm yang ditetapkan di Kabupaten Bintan. Hasil penelitian ini merupakan rekomendasi evaluatif secara formatif bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya baik dalam skala daerah maupun skala nasional dalam hal menyusun kebijakan terkait program pemberdayaan masyarakat desa yang menggunakan sumber daya alam hutan (SDAH) di masa mendatang.

Key word: Pemberdayaan Masyarakat; Hutan Kemasyarakatan; Evaluasi Formatif.

© 2019 Published by Governmental Studies. Selection and/or peer-review under responsibility of JIP.

Acknowledgment

Artikel ini didanai dari penelitian Hibah DIKTI dengan Perjanjian Kontrak Nomor 042/L10/AK.04/Kontrak-Penelitian 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Kontrak Penelitian antara Kemenristekdikti dan LLDIKTI wilayah X

1. Pendahuluan

Hutan kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Bintan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan bernomor SK.114/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan seluas 295 Hektar di Kawasan Hutan Lindung ditetapkan pada Desa Busung dan Desa Kuala Sempang Kabupaten Bintan. Sejak ditetapkan sebagai wilayah HKm, maka berbagai program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan pada Desa Busung dan Desa Kuala Sempang. Beberapa program pemberdayaan masyarakat tersebut disusun dan diselenggarakan oleh BPDAS Kepulauan Riau dan ITTO dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui skema HKm di Desa Busung dan Desa Kuala Sempang di Kabupaten Bintan. Program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan melalui skema HKm yaitu Ekowisata Mangrove, Program Pembibitan dan Penanaman Mangrove, Program Budidaya Ikan, Udang dan Kepiting Bakau, dan Program Pengelolaan Hasil Mangrove (Purnomo, Ramdani, Setyadiharja, & Muzwardi, 2018)

Namun program-program pemberdayaan masyarakat melalui skema HKm tersebut menuai hambatan dan masalah. Program Ekowisata Mangrove hanya berjalan selama delapan bulan sejak ditetapkan sebagai wilayah HKm, kemudian perlahan ditinggalkan oleh kelompok tani hutan karena kekurangan pemahaman terhadap program dalam skema HKm itu sendiri. Beberapa sarana seperti perahu pokcai dijual oleh masyarakat karena dianggap

tidak mendatangkan manfaat secara langsung. Selain itu, program budidaya ikan mengalami keterbatasan sumber daya misalnya terbatasnya bibit ikan dan mahalnnya bibit ikan tersebut. Untuk program pengelolaan hasil mangrove memiliki keterbatasan promosi produk yang telah dihasilkan. Sehingga produk mengalami kesulitan dalam hal penjualan kepada konsumen. Hingga saat ini, hanya program pembibitan dan penanaman mangrove yang masih bertahan, karena bibit mangrove diberikan dan difasilitasi oleh BPDAS Kepulauan Riau (Purnomo et al., 2018). Tujuan penelitian adalah melakukan evaluasi terhadap program pemberdayaan masyarakat melalui skema hutan kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kabupaten Bintan yang hasilnya menjadi sebuah rekomendasi bagi Pemangku Kepentingan yang terkait dengan program pemberdayaan masyarakat.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang di gunakan adalah penelitan deskriptif evaluatif yakni penelitian yang berupaya menyajikan gambaran yang terperinci mengenai suatu situasi khusus dilokasi penelitian dengan tujuan menggambarakan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di dua desa pesisir di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yaitu Desa Busung dan Desa Kuala Sempang, alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yaitu SK.114/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyaratan, Desa

Busung dan Desa Kuala Sempang merupakan dua desa pesisir yang ditetapkan sebagai hutan kemasyarakatan dengan luas 295 hektar.

Adapun konsep yang digunakan di dalam penelitian ini Dale (Sardjo, Darmajanti, & Boediono, 2017) yaitu dengan melihat dimensi-dimensi evaluasi kinerja program yaitu *Relevance* (Keberkaitan), *Effectiveness* (Efektivitas), *Impact* (Dampak), *Efficiency* (Efisiensi), *Sustainability* (Keberlanjutan), dan *Replicability* (Replikabilitas). Dalam dimensi keberkaitan yang menjadi perhatian adalah alasan dan pertimbangan program pemberdayaan dipilih, proses penyusunan program pemberdayaan masyarakat, aktor yang terlibat dan bagaimana tingkat keberhasilan (Sardjo et al., 2017). Di dalam dimensi efektivitas yang menjadi perhatian di dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat adalah manfaat dari program pemberdayaan masyarakat, alasan mempertahankan program dan ketercapaian tujuan program pemberdayaan masyarakat (Sardjo et al., 2017).

Dalam dimensi dampak hal yang menjadi perhatian adalah manfaat langsung dan tidak langsung baik terhadap kelompok sasaran maupun warga komunitas di luar kelompok. Kemudian dijelaskan bahwa dampak program pemberdayaan dapat memiliki dampak positif dan negatif sebagai akibat pengelolaan kegiatan implementasi program. Sehingga hal-hal tersebut menjadi perhatian untuk melihat dimensi dampak dari sebuah program (Sardjo et al., 2017).

Selanjutnya adalah dimensi efisiensi, dimensi ini dalam evaluasi program formatif

berupaya untuk mengukur seberapa besar manfaat program dikaitkan dengan sumberdaya yang telah dikeluarkan oleh program pemberdayaan. Hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk melakukan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dari dimensi efisiensi adalah bagaimana penggunaan sumber daya baik sumber daya keuangan dan juga sumber daya manusia, serta penggunaan sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan dan manfaat dari program pemberdayaan masyarakat (Sardjo et al., 2017).

Keberlanjutan adalah dimensi selanjutnya dalam hal melakukan evaluasi program pemberdayaan masyarakat. Keberlanjutan program pemberdayaan dievaluasi setelah tahap implementasi selesai dilakukan, dimensi ini digunakan untuk melihat seberapa besar program pemberdayaan masyarakat dapat terus berlanjut. Sehingga hal-hal yang diamati pada dimensi ini adalah tingkat keberlanjutannya, faktor yang menjadi penghambat bagi keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mempertahankan keberlanjutan program pemberdayaan.

Dimensi replikabilitas merupakan dimensi terakhir untuk melakukan evaluasi kinerja program pemberdayaan masyarakat secara formatif. Dimensi ini memang tidak mudah karena pengaruh kondisi sosial, ekonomi, budaya setiap masyarakat, namun paling tidak hasil dari evaluasi program pemberdayaan masyarakat dapat dirumuskan aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dan dapat dirumuskan sebagai suatu rumusan generik bagi

program pemberdayaan yang mempunyai sasaran dan tujuan yang sama (Sardjo et al., 2017).

3. Hasil Dan Pembahasan Program Ekowisata Mangrove

Program ekowisata mangrove ini berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove telah merupakan suatu arah kebijakan untuk melakukan pengelolaan mangrove berbasis masyarakat sehingga menghantarkan Desa Busung dan Desa Kuala Sempang mendapatkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.114/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan seluas 295 hektar pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Kementerian Kehutanan, 2007), (Kementerian Kehutanan, 2014).

Salah satu bentuk pengelolaan ekosistem mangrove dengan skema HKm adalah untuk pengembangan pariwisata. Banyak wisatawan yang datang ke lokasi mangrove untuk melihat dan mengamati sambil menyusuri laut di pinggir ekosistem mangrove dengan menggunakan perahu. Para wisatawan ditemani pemandu wisata yang terlatih dan profesional. Sebagian besar wisatawan yang datang ke lokasi mangrove berasal dari luar negeri khususnya Singapura. Atraksi wisata mangrove yang ditawarkan antara lain menyusuri pantai yang masih rapat ditumbuhi mangrove, kuliner makanan laut di restoran yang berada di pinggir

pantai atau sekitaran mangrove, penanaman mangrove dan lainnya (Siregar, 2013b).

Dalam mengembangkan pengelolaan Ekowisata Mangrove Berbasis Masyarakat ini pengelola HKm Desa Busung dan Desa Kuala Sempang memegang teguh 5 (lima) lima prinsip dasar berbasis masyarakat yaitu, Keberlanjutan ekowisata dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (prinsip konservasi dan partisipasi masyarakat), Pengembangan institusi masyarakat lokal dan kemitraan (prinsip partisipasi masyarakat), Prinsip Ekonomi berbasis masyarakat, Prinsip edukasi, Pengembangan dan penerapan rencana tapak dan kerangka kerja pengelolaan ekowisata (prinsip konservasi dan wisata) (Effendi, 2013).

Adapun pihak-pihak yang seharusnya ikut serta terlibat di dalam penyusunan program ekowisata sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat di Desa Busung dan Desa Kuala Sempang adalah sebagaimana dijelaskan pada Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Masyarakat Kabupaten Bintan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bintan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan,

Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Bintan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kepulauan Riau, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah Kabupaten Bintan, Kecamatan, dan Perguruan Tinggi (Pemerintah Kabupaten Bintan, 2014). Salah satu kendala dalam keberlanjutan HKm di

Kabupaten Bintan pada masa yang akan datang akan dipengaruhi oleh isu kelembagaan. Isu kelembagaan terdapat koordinasi diantara lembaga terkait dalam pengelolaan HKm termasuk pengelolaan mangrove belum efektif dan kemudian kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan mangrove dan HKm yang telah ada belum berkembang dan berfungsi secara optimal (Effendi, 2013).

Harusnya terjadi suatu proses kolaboratif diantara pemangku kepentingan. Pemerintah harusnya sadar bahwa kolaborasi di dalam pemerintahan bukan hanya semata-mata negosiasi dan kesepakatan akan tetapi tentang pembangunan kepercayaan antar pemangku kepentingan, Ini bukan untuk mengatakan bahwa membangun kepercayaan adalah fase terpisah dari dialog dan negosiasi mengenai hal-hal substantif. Namun, para pemimpin kolaboratif yang baik mengetahui bahwa mereka harus membangun kepercayaan di antara lawan sebelum para pemangku kepentingan akan mengambil risiko manipulasi (Ansell & Gash, 2008), (Purnomo et al., 2018), (Setyadiharja, Suherry, & Dachroni, 2018). Kepercayaan (*trust*) adalah suatu keadaan psikologis berupa keinginan untuk menerima kerentanan berdasarkan pengharapan yang positif terhadap keinginan atau tujuan dari perilaku orang lain (Aubé, Rousseau, & Morin, 2007), (Purnomo et al., 2018), (Setyadiharja et al., 2018).

Program ekowisata merupakan salah satu produk pariwisata alternatif yang mempunyai tujuan seiring dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu pembangunan pariwisata yang secara ekologis memberikan manfaat yang

layak secara ekonomi dan adil secara etika, memberikan manfaat sosial terhadap masyarakat guna memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap memperhatikan kelestarian sosial-budaya, dan memberi peluang bagi generasi muda sekarang dan yang akan datang untuk memanfaatkan dan mengembangkannya (Susanti, 2014).

Keuntungan dalam implementasi program ekowisata yaitu memberikan nilai ekonomi dalam kegiatan ekosistem di dalam lingkungan yang dijadikan sebagai objek wisata, menghasilkan keuntungan secara langsung untuk pelestarian lingkungan, memberikan keuntungan secara langsung dan tidak langsung bagi para pemangku kepentingan, membangun konstitusi untuk konservasi secara lokal, nasional, dan internasional, mempromosikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, mengurangi ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang ada di objek wisata tersebut (Susanti, 2014).

Dalam rangka memperkuat pemahaman masyarakat terhadap tujuan dari program ekowisata ini, salah satu instrumen yang harusnya dilakukan dalam rangka penguatan program pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk mengelola areal HKm dengan optimal sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi dengan tetap menjaga fungsi hutan dari kawasan mangrove (Susanti, 2014).

Dampak program ekowisata yang dikemas dalam bentuk ekowisata mangrove sebagai bentuk program pemberdayaan masyarakat melalui skema hutan kemasyarakatan (HKm),

secara nyata sebenarnya menjawab lima prinsip yang sekaligus juga dampak bagi masyarakat yang merupakan kelompok sasaran program yaitu Dampak Konservasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Dampak Perkembangan Infrastruktur, Dampak Ekonomi Berbasis Masyarakat (Purnomo et al., 2018).

Dalam mendukung program ekowisata di Desa Busung dan Desa Kuala Sempang didukung oleh keberadaan Pulau Empat yang merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang memiliki keindahan alam yang luar biasa. Terletak di Desa Busung dan Desa Kuala Sempang, pulau ini menawarkan panorama hutan mangrove yang menawan. Sumber daya lainnya untuk mendukung program ekowisata ini adalah perahu *pokcai* yang merupakan alat transportasi tradisional yang digunakan untuk berkeliling dalam program ekowisata. Dari sisi sumber daya manusia, di kedua desa memiliki jumlah personil KTH yang cukup banyak, dan sudah merupakan kelompok yang legalitasnya diperkuat dengan Keputusan Kepala Desa No.11/DBS/2012 tentang Pembentukan Kelompok Tani Ketapang Putih Desa Busung dan SK.114/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan. Dengan kondisi mata pencaharian anggota masing-masing KTH adalah nelayan dan petani atau lebih dikenal dengan petani kebun. KTH ini berdasarkan inisiatif BPDAS Kepulauan Riau telah dilakukan inisiasi dan pengawasan berkelanjutan agar program ekowisata di Desa Busung dan Kuala Sempang dapat terselenggarakan dengan optimal. Namun isu kelembagaan yaitu kurang dukungan kelembagaan pemerintah daerah menyebabkan

banyak sarana tidak efisien sehingga tidak tampak berdaya guna sehingga program tidak berlanjut (Effendi, 2013).

Langkah-langkah untuk mempertahankan keberlanjutan program ekowisata yang merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui skema HKm ini, yaitu Peningkatan Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Tentang Ekosistem Mangrove, Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas antara Instansi Pemerintah Daerah, Tersedianya Sistem Informasi yang Lengkap dan Valid (Purnomo et al., 2018). Dengan demikian, harusnya berbagai *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat melalui skema HKm khususnya pada hutan mangrove menyadari penting nilai ekologis dari program ini, karena program ekowisata mangrove selain sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga mampu meningkatkan usaha konservasi alam sehingga ekosistem mangrove terjaga, dan wilayah pesisir pantai atau lautan tercegah dari abrasi. Program ekowisata merupakan salah satu program yang mampu dilaksanakan di berbagai daerah yang tingkat kerapatan mangrovenya tinggi, dan juga sekaligus sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mampu menjadi instrumen untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengkonservasi nilai-nilai ekologis. Sehingga pemerintah daerah dapat dengan mudah menciptakan suatu atraksi wisata dengan pendekatan *community based tourism*. Disatu sisi kawasan wisata mangrove terbangun dan masyarakat dapat mencapai tingkat kesejahteraan karena ikut terlibat dalam

merencanakan, mengelola dan mengawasi program tersebut (Purnomo et al., 2018).

Program Pembibitan Dan Penanaman Mangrove

Program pemberdayaan masyarakat melalui skema HKm di Desa Busung dan Desa Kuala Sempang dengan Program Pembibitan dan Penanaman Mangrove juga mendukung Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Masyarakat Kabupaten Bintan Tahun 2014. Dimana di dalam kebijakan ini terdapat kegiatan pokok yaitu Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Mangrove. Tujuan kegiatan pokok ini adalah mempertahankan keberadaan dan fungsi ekosistem mangrove dan meningkatkan kualitas ekosistem mangrove. Tujuan ini dicapai dengan strategi melaksanakan rehabilitasi kawasan mangrove yang rusak. Salah satu kegiatan dalam program ini adalah pengembangan pembibitan mangrove dengan indikator keberhasilan program yaitu tersedianya persemaian mangrove (Pemerintah Kabupaten Bintan, 2014).

Program pembibitan dan penanaman mangrove ini dikarenakan kesadaran masyarakat akan ancaman keberadaan dan kelestarian ekosistem mangrove di antara pengalihan alih fungsi ekosistem mangrove menjadi pemukiman penduduk, pemanfaatan kayu dari mangrove untuk arang, penambangan ilegal dan liar, dan penebangan pohon mangrove yang ilegal dan liar (Effendi, 2013).

Mangrove juga penting bagi pariwisata. Desa Busung dan Desa Kuala Sempang sangat potensial untuk dijadikan sebagai tujuan pariwisata mangrove. Desa Busung dialiri oleh

beberapa sungai seperti Sungai Lapan, Sungai Siti, dan Sungai Teka. Ditengah-tengah wilayahnya terdapat pulau yang kesemuanya ditumbuhi mangrove (Siregar, 2013b). Mangrove juga penting sebagai habitat bagi larva dan juwana berbagai jenis hewan pada ekosistem laut dangkal, sehingga secara tidak langsung memiliki keterkaitan dengan kualitas dan kuantitas sumber daya ikan dan biota lainnya. Manfaat lain dari ekosistem mangrove yang dapat dikembangkan adalah mangrove untuk pendidikan lingkungan. Banyak program yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan ekosistem mangrove, diantaranya kegiatan pembibitan, penanaman, pengayaan, pusat informasi mangrove, sarana penelitian dan pengembangan, serta pendidikan lingkungan bagi anak sekolah maupun masyarakat umum (Siregar, 2013a). Dampak program pembibitan dan penanaman mangrove ini antara lain, Dampak Secara Fisik (Ekologis), Dampak Secara Biologi, Dampak Secara Ekonomi (Pemerintah Kabupaten Bintan, 2014). Potensi vegetasi mangrove benar-benar dimanfaatkan dan dilakukan penanaman secara kesinambungan. program ini dinyatakan efektif dan efisien karena warga sudah lebih banyak mengetahui manfaat dan fungsi ekosistem mangrove jika dibandingkan dengan desa lainnya di Kabupaten Bintan (Effendi, 2013).

Dalam konteks keberlanjutan, program penanaman pembibitan mangrove yang paling lama bertahan dibanding program pemberdayaan masyarakat lainnya. Terdapat beberapa faktor penghambat bagi keberlanjutan program ini kedepan, yaitu Ancaman Kerusakan Mangrove yang Tinggi, Belum adanya Penguatan

Kebijakan dari Pemerintah Daerah. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu Perbaikan dan Pemulihan Ekosistem Mangrove, Penyusunan dan Penerapan Kebijakan dan Peraturan dari Pemerintah Daerah (Purnomo et al., 2018).

Adapun hal yang dapat diambil menjadi catatan penting dalam penyelenggaraan program penanaman dan pembibitan mangrove di Desa Busung dan Desa Kuala Sempang yaitu adanya arah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bintan (Pemerintah Kabupaten Bintan, 2014). Meski dokumen ini tidak berujung pada legalitas hukum yang kuat. Namun setidaknya Kabupaten Bintan memiliki *grand design* dalam rangka pengelolaan mangrove lewat program pemberdayaan masyarakat. Terdapat hal-hal pokok yang mampu digunakan di wilayah lain dalam hal pengelolaan mangrove. Seperti pada tataran prinsip dalam pemanfaatan kawasan mangrove yaitu Memprioritaskan pemanfaatan kawasan mangrove untuk kegiatan pariwisata dan pengembangan hasil hutan bukan kayu, Memprioritaskan peran masyarakat setempat dalam pemanfaatan kawasan mangrove, Melakukan konservasi untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan perlindungan pantai, Melakukan rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas ekosistem mangrove, Mengembangkan penelitian dan pengembangan sebagai pendukung dalam memperkuat pengelolaan kawasan mangrove secara lestari (Pemerintah Kabupaten Bintan, 2014).

Prinsip-prinsip pemanfaatan kawasan mangrove ini merupakan hal-hal yang menjadi dasar dalam pengelolaan ekosistem mangrove di berbagai wilayah lainnya, selama ekosistem mangrovenya secara kuantitas dapat dilakukan konservasi. Kemudian prinsip-prinsip ini juga menuangkan beberapa kegiatan pokok yang menjadi langkah pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan mangrove yaitu Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Mangrove, Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Mangrove, Penyuluhan Pelestarian Mangrove, Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kawasan Mangrove, Penguatan Kelembagaan Masyarakat, Peningkatan Kemampuan Masyarakat, Penegakan Hukum (Purnomo et al., 2018).

Program Budidaya Ikan, Udang, Dan Kepiting Bakau

Program pemberdayaan masyarakat selanjutnya melalui HKM di Desa Busung dan Desa Kuala Sempang Kabupaten Bintan adalah Program Budidaya Ikan, Udang dan Kepiting Bakau. Di Kabupaten Bintan terdapat sekitaran 10.000 orang merupakan nelayan yang sangat tergantung pada hasil perikanan tangkap ataupun budidaya. Potensi perikanan saat ini dimanfaatkan sekitaran 30% pada kisaran 39.938 ton. Menurut kajian *Seafdec* tahun 2006 potensi perikanan Kabupaten Bintan mencapai 133.112 ton pertahun. Dengan demikian potensi perikanan tangkap di Kabupaten Bintan masih bisa dikembangkan. Demikian juga dengan perikanan budidaya masih bisa dikembangkan untuk berbagai komoditas seperti ikan, kerapu, gonggong dan lain-lain (Siregar, 2013b).

Dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat ini dalam skema HKm di Desa Busung dan Desa Kuala Sempang, pengelola HKm mendapatkan fasilitasi berupa pelatihan *Silvofishery* Masyarakat HKm yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia lewat BPDAS Kepulauan Riau dan *International Tropical Timber Organization* (ITTO) pada 11-12 Juni 2014 di Aula Kantor Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pelatihan ini, pengelola HKm diberi materi yaitu Manajemen Usaha Perikanan, Materi Budidaya Ikan di Kawasan Perairan Ekosistem Mangrove dengan Sistem Keramba Jaring Apung (KJA) dan Materi Pengelolaan Kesehatan Ikan (Alustco, 2014). Strategi pemberdayaan masyarakat seperti ini merupakan strategi pemberdayaan masyarakat dalam aras mikro, dan aras mezzo dimana masyarakat diberikan bimbingan, konseling, stress management, *crisis intervention*. Tujuannya adalah membimbing atau melatih seseorang

dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas, selain itu Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi, pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap seseorang agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya (Sofinisa, Haryono, & Mindarti, 1850). Dampak secara umum program pembibitan ikan, udang dan kepiting bakau adalah meningkatkan

budidaya perikanan laut pada masyarakat yang pada akhirnya terjadi peningkatan ekonomi masyarakat (Pemerintah Kabupaten Bintan, 2014).

KTH Ketapang Putih yang berada di desa tersebut cukup aktif dalam pengembangan perikanan budidaya, khususnya budidaya ikan kerapu. KTH Ketapang Putih ini juga sering diundang untuk mengikuti pelatihan budidaya ikan, baik ikan laut dan ikan tawar yang dilakukan instansi pemerintah selain pelatihan yang telah dijelaskan di atas. Selain pelatihan di tingkat daerah juga pelatihan di tingkat nasional yang diselenggarakan di Jawa. Hal ini yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi perikanan budidaya khususnya yang berada di wilayah perairan di sekitar ekosistem mangrove karena telah mengetahui dan memahami manfaat dan fungsi mangrove sebagai sumber pendapatan yang diperoleh dari budidaya ikan di wilayah sekitar ekosistem mangrove (Effendi, 2013).

Program Pembibitan Ikan, Udang dan Kepiting Bakau ini jika dinilai dari sisi efisiensinya memang ditemukan rendah. Harga bibit ikan dan udang membutuhkan modal besar. Terlebih lagi bibit ikan yang berkualitas tinggi, Modal terbesar digunakan untuk membeli bibit ikan. Bibit ikan berkualitas tinggi mempunyai harga yang jauh lebih mahal dibanding dengan berkualitas rendah. Kualitas bibit ini akan berpengaruh terhadap hasil panen karena terkait dengan kualitas hidup dari setiap bibit yang dikembangkanbiakan. selain itu pakan bagi ikan juga memegang peranan penting dalam budidaya perikanan. Pakan yang dikonsumsi

ikan juga harus berkualitas baik karena berpengaruh terhadap kesehatan ikan dan volume hasil panennya. Masyarakat berharap mendapatkan bantuan dan modal dari pembinaan dari pemerintah daerah untuk pengembangan budidaya ini (Effendi, 2013).

Peningkatan program pemberdayaan masyarakat secara kolaboratif melalui harusnya dilakukan dengan langkah yaitu Peningkatan program pelatihan tentang pengelolaan dan pengembangan HKm, khususnya dalam pembibitan ikan, udang dan kepiting bakau yang lebih mengarah kepada kemandirian masyarakat dalam pengelolaan, Peningkatan program pelatihan dan bantuan teknis khususnya dalam hal yang berkaitan dengan keberlanjutan program seperti sarana keramba, bibit ikan dan sarana pelengkap lainnya, Peningkatan program kerjasama dengan para pihak (pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya yang relevan). Memperkuat semangat kewirausahaan bagi masyarakat, agar mengetahui bagaimana mengelola sumber daya perikanan yang menghasilkan nilai ekonomi serta berkelanjutan, tanpa menunggu datangnya bantuan dari pemerintah daerah atau pihak lain, namun mampu mandiri dalam pengembangan usaha perikanan (Purnomo et al., 2018).

Bagaimanapun tidak berlanjutnya program pembibitan ikan, udang dan kepiting bakau ini, namun ada hal yang unik dipertahankan dan mampu diadopsi oleh tempat lain dalam rangka program pemberdayaan masyarakat melalui skema HKm, yaitu, Pemanfaatan sumber daya keluatan sebagai suatu media dalam

mendukung pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya kehutanan, Sistem pembibitan ikan dengan teknik silvofishery. Sistem ini merupakan salah satu sistem yang mampu dijadikan contoh sekaligus sebagai suatu bentuk budidaya perikanan berkelanjutan dengan input rendah yaitu dengan pendekatan konservasi dan pemanfaatan mangrove (Alustco, 2014).

Program Pengolahan Hasil Mangrove

Program pemberdayaan masyarakat selanjutnya melalui skema HKm di Desa Busung dan Desa Kuala Sempang adalah Pengolahan Hasil Mangrove. Program ini senada juga dengan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Masyarakat Kabupaten Bintan Tahun 2014 dalam kegiatan pokok Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kawasan Mangrove dengan kegiatan Pengembangan Pangan Alternatif Berbahan Baku Mangrove. Indikator keberhasilan program ini yaitu tersedianya teknik pengembangan pangan alternatif berbahan baku mangrove (Effendi, 2013).

Sebagian masyarakat di Desa Busung dan Desa Kuala Sempang juga telah memanfaatkan buah mangrove untuk dijadikan sebagai bahan makanan seperti kue-kue dan roti, serta minuman seperti jus dan sirup. Pembuatan masakan dan minuman ini dilakukan oleh ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok PKK. Menurut mereka, kegiatan pembuatan makanan dan minuman yang berasal dari pohon mangrove ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menambahkan penghasilan.

Namun demikian, produksi makanan dan minuman ini masih terbatas dan belum dilakukan dalam skala besar (Effendi, 2013).

Program Pengolahan Hasil Mangrove selain untuk pariwisata, budidaya perikanan dan pendidikan lingkungan juga dapat berupa pengelolaan hasil untuk pangan. Potensi pemanfaatan mangrove untuk pangan. Pada Desa Busung dan Desa Kuala Sempang terdapat mangrove berjenis sama yang mampu dimanfaatkan untuk bahan pangan, yaitu nipah dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan santan, jus, sirup, tepung, dan gula merah. Berembang dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan tepung untuk dodol, sirup dan jus. Perepat sebagai bahan untuk pembuatan sabun, shampoo, dan antiseptik. Boros dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan cat, dodol, warna untuk pakain dan puding. Tumu dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan dodol dan tepung (Effendi, 2013).

Desa Busung dan Desa Kuala Sempang melalui Skema HKMnya telah dapat memanfaatkan buah dan pohon dari ekosistem mangrove lebih banyak dibanding desa lainnya. Kedua desa ini telah beberapa kali mengikuti pelatihan tentang pemanfaatan buah pohon mangrove sebagai bahan makanan. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah seperti Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan. Pelatihan yang diikuti dengan praktik langsung ini dibimbing oleh narasumber dan pembimbing yang kompeten dan berpengalaman yang datang dari luar daerah seperti Surabaya Jawa Timur. Menurut pengakuan masyarakat

Desa Busung dan Desa Kuala Sempang, mereka telah merasakan manfaat yang besar dari adanya pelatihan tersebut. Selain mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman, masyarakat juga mampu mandiri dengan cara menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama pelatihan dan pendampingan. Hal ini menjadi modal utama bagi masyarakat untuk tetap terus meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan buah pohon mangrove untuk dijadikan sebagai bahan makanan dan minuman (Effendi, 2013).

Program pemanfaatan hasil mangrove ini dilakukan sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat melalui skema HKM adalah bertujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat baik di Desa Busung dan Desa Kuala Sempang untuk dapat mengelola areal hutan kemasyarakatan dengan optimal sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi dengan tetap menjaga fungsi ekologi dari kawasan mangrove, dan keluaran program pemberdayaan masyarakat ini harapannya adalah masyarakat dapat meningkatkan keterampilan mengenai teknik budidaya mangrove dan khususnya dapat melakukan pengelolaan berbagai produk Hasil Hutan Bukan Kayu mangrove yang dapat memicu peningkatan ekonomi masyarakat (Susanti, 2014).

Program pemanfaatan hasil mangrove ini mampu memberikan dampak yaitu, Sumber devisa bagi daerah, Peningkatan sosial ekonomi masyarakat, Rehabilitasi lahan dan hutan, mencegah erosi, peningkatan kualitas lingkungan dan pengatur tata air, Pencegahan atau

mengurangi perladangan berpindah, Pencegahan laju urbanisasi (Susanti, 2014).

Dampak yang paling nyata dari program pemanfaatan hasil mangrove ini adalah dihasilkan beberapa produk dari masyarakat Desa Busung dan Desa Kuala Sempang antara lain Bahan pencelup pakaian (pewarna) yang diperoleh dari kulit *rhizopora*, Pewarna batik dari limbah mangrove, Produk kue dan makanan ringan hasil olehan buah api-api (*Avicenna*) berupa wajik api-api, bubur api-api, puding api-api, bolu api-api dan krupuk, Tepung beras dari buah Lindur (*Bruguiera*), Selai Pedada, Sirup Pedada, Sabun Pedada dan Mengkudu, dan Dodol Pedada. Semua ini merupakan hasil dari olahan buah pedada (*Sonneratia caseolaris*) (Susanti, 2014).

Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah mengembangkan usaha masyarakat dengan langkah-langkah yaitu Peningkatan program pelatihan dan pendampingan tentang pengelolaan dan pengembangan program berbasis HKm, Peningkatan program pelatihan tentang kewirausahaan bagi masyarakat terkait dengan pengelolaan dan pengembangan berbasis HKm, Peningkatan program kerjasama atau kemitraan antara masyarakat dengan para pihak (pemerintah dan swasta) dalam rangka pengelolaan dan pengembangan berbasis HKm, Peningkatan pelatihan teknis pembuatan bahan makanan dan minuman yang berasal dari mangrove, Peningkatan pelatihan teknis tentang perikanan budidaya di sekitar wilayah HKm, Peningkatan pelatihan teknis penyusunan dan pengembangan pariwisata dalam program pengelolaan HKm, Peningkatan pelatihan teknis

tentang pendidikan lingkungan mangrove, Peningkatan promosi kepada para pihak, baik dalam negeri dan juga luar negeri berkaitan dengan HKm dengan segala program pengelolaan dan pengembangan ekosistem berbasis masyarakat dengan skema HKm melalui berbagai media, Peningkatan dukungan dari pihak (pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga lainnya yang relevan) dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Hkm (Purnomo et al., 2018).

Program ini merupakan kegiatan yang juga merupakan program pengembangan pangan alternatif berbahan baku mangrove yang indikator keberhasilannya adalah tersedianya teknik pengembangan pangan alternatif berbahan baku mangrove. Mangrove yang merupakan salah satu sumber daya hutan mampu menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu hutan yang tadinya hanya dieksplotasi hanyalah hasil kayu yang terkadang disalahgunakan, namun dalam program ini lebih mengajarkan masyarakat untuk mampu memanfaatkan hasil hutan bukan kayu menjadi suatu produk pangan yang lebih berguna dalam peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Selain itu, program ini juga mendidik masyarakat untuk belajar berpikir kreatif, bahwa dari ekosistem mangrove yang tumbuh dan hidup di wilayah sungai atau rawa-rawa mampu menjadi suatu produk lainnya yang mampu mendatangkan keuntungan bagi masyarakat tersebut. Hal ini perlu menjadi percontohan bagi wilayah lain, yang juga memiliki ekosistem mangrove yang cukup luas. Program ini juga sekaligus menyelamatkan

ekosistem mangrove dari perbuatan tidak bermanfaat lainnya yang biasa dilakukan oleh oknum tertentu terhadap ekosistem mangrove sehingga merusak nilai-nilai ekologis. Selain itu juga melindungi mangrove dari ancaman kerusakan alam secara natural karena dengan program ini, mangrove akan lebih dijaga oleh masyarakat, karena masyarakat memahami benar arti penting dari ekosistem mangrove (Pemerintah Kabupaten Bintan, 2014).

4. Simpulan

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah bahwa *pertama*, program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui skema hutan kemasyarakatan belum mampu meningkatkan taraf hidup kelompok sasaran secara signifikan, baik dari sisi ekonomi, kemandirian, dan juga keberlanjutan. *Kedua*, Minimnya kolaborasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi tidak efektifnya masing-masing program pemberdayaan masyarakat, hal tersebut kemudian mempengaruhi capaian program yang minim akan peningkatan ekonomi dan keberlanjutan program. Sehingga masyarakat yang menjadi kelompok sasaran tetap pada kondisi awal sebelum program pemberdayaan masyarakat diselenggarakan. *Ketiga*, terjadi perubahan kewenangan antar lembaga/instansi yang bertanggung jawab atas program pemberdayaan masyarakat baik lembaga/instansi vertikal tingkat pusat maupun secara horizontal di lembaga/instansi di tingkat daerah, sehingga program pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilanjutkan atas dasar perubahan kewenangan atau terbatasnya kewenangan lembaga/instansi

yang mengelola program pemberdayaan masyarakat.

5. Rekomendasi

Adapun saran dari penelitian ini sekaligus sebagai rekomendasi atas hasil evaluasi program pemberdayaan masyarakat melalui skema HKm di Desa Busung dan Desa Kuala Sempang Kabupaten Bintan adalah *pertama*, penguatan sinergitas pemangku kepentingan yang terlibat di dalam program pemberdayaan, sehingga program pemberdayaan menjadi lebih kuat baik kuat secara dukungan sumber daya, kebijakan dan legalitas, serta finansial. *Kedua*, pendampingan secara intens dari semua pemangku kepentingan kepada masyarakat agar pemahaman masyarakat terhadap program pemberdayaan semakin baik, dengan penguatan pemahaman masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program menjadi kuat dan akan terlibat penuh dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. *Ketiga*, perluasan output dari program, hal ini dilakukan agar output yang dihasilkan dari program tidak berada dalam status terbiarkan. Namun mampu berkembang ke tahapan yang lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Alustco, S. et al. (2014). *Laporan Pelaksanaan Pelatihan Silvofishery Masyarakat HKm Desa Busung dan Desa Kuala Sempang Kabupaten Bintan*. Jakarta.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Aubé, C., Rousseau, V., & Morin, E. M. (2007). Perceived organizational support and organizational commitment: The

moderating effect of locus of control and work autonomy. *Journal of Managerial Psychology*, 22(5), 479-495. <https://doi.org/10.1108/02683940710757209>

- Effendi, A. (2013). *Kajian Sosial Ekonomi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau*. Kepulauan Riau.
- Kementerian Kehutanan. *Peraturan Menteri Kehutanan No.37 Tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.*, (2007).
- Kementerian Kehutanan. *Surat Keputusan Menteri Kehutanan bernomor SK.114/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan seluas 295 Hektar di Kawasan Hutan Lindung pada Desa Busung dan Desa Kuala Sempang Kabupaten Bintan.*, (2014).
- Pemerintah Kabupaten Bintan. (2014). *Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Masyarakat*. Bintan.
- Purnomo, E. P., Ramdani, R., Setyadiharja, R., & Muzwardi, A. (2018). *Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Hutan Berbasis Masyarakat*.
- Sardjo, S., Darmajanti, L., & Boediono, K. (2017). *Implementasi Model Evaluasi Formatif Program Pembangunan Sosial*. Jakarta: Obor.
- Setyadiharja, R., Suherry, S., & Dachroni, R. (2018). Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Pada Desa Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(2), 3-9. <https://doi.org/10.24905/jip.v3i2.987>
- Siregar, A. F. (2013a). *Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Masyarakat dan Stock Karbon di Kabupaten Bintan*. Jakarta.
- Siregar, A. F. (2013b). *Laporan Kegiatan Review dan Analisis Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Bintan*. Jakarta.
- Sofinisa, A., Haryono, B. S., & Mindarti, L. I. (1850). *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Pedesaan*. 3(11), 1844-1850.
- Susanti, N. N. Y. et al. (2014). *Laporan*

Pelaksanaan Pelatihan Ekowisata dan Pelatihan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Mangrove untuk Masyarakat Desa Busung dan Kuala Sempang. Jakarta.

Profil Penulis

Rendra Setyadiharja, Lahir di Tanjungpinang tanggal 20 Maret 1986, merupakan seorang penyair dan juga dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang Kepulauan Riau. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 003 Tiban Batam (lulus tahun 1999), kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjungpinang (lulus tahun 2002), selanjutnya melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri1 Tanjungpinang (lulus tahun 2005). Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 di STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang pada Program Studi Ilmu Pemerintahan (lulus tahun 2010), kemudian menyelesaikan magisternya di Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (lulus tahun 2014) dengan predikat Cumlaude dan Terbaik.

Raja Dachroni, Lahir di Kijang 16 Mei 1987. Anak keempat dari empat bersaudara ini memulai pendidikan formalnya di SD Negeri 019 Bintan Timur tahun 1993 dan tamat tahun 1999, masuk SMP Negeri 1 Bintan Timur tamat 2002 lalu meneruskan ke SMA Negeri 1 Tanjungpinang dan tamat pada tahun 2005. Dengan pertimbangan ingin meneruskan serta melanjutkan jenjang pendidikan formalnya pada tahun 2005 mendaftar sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji (STISIPOL) dan di wisuda pada akhir tahun 2009. Tahun 2012 dia melanjutkan studi S2 di Program Studi Ilmu Politik dengan konsentrasi Manajemen Pemerintahan Daerah dan berhasil menjadi lulusan terbaik di program studi S1 dan S2

Suherry, Lahir di Pangkal Pinang - Bangka tanggal 18 Agustus 1985, merupakan seorang dosen pada Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang Kepulauan Riau. Sekolah pendidikan dasar di SDN 021 Manggar - Belitung; SDN 016 Pangkal Pinang - Bangka; SDN 027 Tanjung Pandan - Belitung ; dan kembali di SDN 021 Manggar - Belitung (lulus tahun 1997), kemudian melanjutkan ke SMPNegeri 1 Manggar - Belitung (lulus tahun 2000), selanjutnya melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Bintan Timur (lulus tahun 2003). Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 di STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang pada Program Studi Ilmu Pemerintahan (lulus tahun 2009), kemudian menyelesaikan magisternya di Magister Ilmu Politik Konsentrasi Manajemen Pemerintah Daerah di Universitas Riau (lulus tahun 2014) .